

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa pendidikan politik bukanlah merupakan monopoli pemerintah, lembaga pendidikan formal maupun partai politik. Di luar itu masih ada pendidikan politik yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti dalam lingkup organisasi dan komunitas HTI. Keunikan dari pendidikan politik di HTI ini adalah pijakannya yang benar-benar serba berlandaskan keagamaan dengan menyebutnya sebagai pendidikan Fiqih Siyasah.

Berbeda halnya dengan organisasi lain yang sudah mengadopsi hal-hal yang bersifat ke-Indonesiaan (kontekstual), HTI tidak pernah melakukan hal tersebut. Gerakannya yang bersifat Tarbiyah internasional ternyata sudah mulai mendapat dukungan di sebagian umat Islam Indonesia.

Metode pendidikannya melalui halaqah-halaqah mingguan dan bulanan yang dilakukan secara intens, kontinu dan berkesinambungan, ternyata telah mampu menghasilkan kader-kader yang begitu setia terhadap *Hizibnya*. Para anggota dan pengurusnya sangat taat pada ajaran-ajaran Islam yang digerakan oleh Syaikh Taqiyudin an-Nabhani sebagai pendiri HT Dunia.

Metode halaqah yang diciptakannya ternyata juga telah mampu menciptakan budaya politik tersendiri yang berbeda dengan budaya-budaya politik lainnya yang dibuat pengklasifikasiannya oleh para ahli Indonesianis. Mereka sangat aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak Islami dan merugikan ummat, namun pada saat yang sama mereka pun tidak pernah mau duduk ikut aktif terlibat dalam sistem pemerintahan yang dianggapnya kuffar dan tidak Islami ini. Itulah sebabnya penulis menyebut dan mengklasifikasikan mereka dengan budaya politik *Religio Politic Cosmopolit*

Strukturnya yang mendunia, sumber dan kepemimpinannya yang sama serta koordinasinya dengan sesama HT di negara lain telah mampu menggerakkan HT ini menjadi gerakan yang mendunia dengan salah satu cabang organisasinya adalah HTI ini.

Pemahaman dan pemikirannya yang berbeda terhadap sistem pemerintahan demokrasi dan segala atribut yang menyertainya memang agak merisaukan sebagian kalangan yang khawatir itu akan menjadi gerakan politik anarkis. Sekalipun secara empirik hal itu tidak pernah terjadi sampai saat ini bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi, karena menurut para pengurusnya, gerakan ini adalah gerakan dakwah tarbiyyah yang secara kultural sangat menjauhi kekerasan. Sekalipun begitu, akan lebih baik jika gerakan dan pemahaman ini lebih sering lagi berdialog dengan fihak lain yang bersebrangan faham dengannya untuk membangun

kesaling pengertian dan kesepahaman antar komponen politik bangsa, agar dapat bersinergi memberikan kesadaran politik yang sama kepada warga dalam rangka mencapai negara yang *baladun toyyibun wa robbun ghoffur*.

B. Rekomendasi

1. Untuk Hizbut Tahrir Indonesia

Perlu lebih disosialisasikan lagi pemikiran-pemikiran Syaikh Taqiyudi an-Nabhani ini kepada pemerintah dan fihak lain yang terkait agar dapat terjadi dialog dan komunikasi yang lebih intens dalam rangka menimbulkan kesaling pengertian dan kesepahaman antara fihak satu dengan fihak lainnya.

Budaya politik yang dalam istilah penulis ini adalah budaya religio politic cosmopolit, bisa diarahkan dan disinergikan untuk mempererat bukan saja hubungan HT antar negara di dunia, melainkan bisa juga diarahkan untuk mempererat hubungan antar pemerintahan dimana organisasi HT itu berada.

Perbedaan pemahaman terhadap sistem politik, hukum, pemerintahan, demokrasi beserta atribut yang menyertainya harus dikemas sedemikian rupa agar jangan sampai menimbulkan tafsiran fihak lain yang dalam bahasa orde baru bisa disebut

sebagai gerakan makar, gerakan anti pemerintah atau gerakan subversif yang dapat merugikan semua pihak.

Aksi-aksi demo yang sering dilakukan HTI, harus bisa diarahkan dan dijadikan sebagai alat kontrol yang efektif pada pemerintah sejauh yang dikritik oleh HTI adalah kebijakannya bukan pada personil yang mengeluarkan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan ketersinggungan secara pribadi dan menimbulkan terganggunya ukhuwah Islamiyyah atau ukhuwah wathoniyah.

Perlu juga dipertimbangkan untuk menggunakan fiqh yang lebih kontekstual ke-Indonesiaan tidak semata-mata tekstual. Karena hakikat fiqh adalah menghukumi kehidupan kekinian yang bersifat kontekstual dengan tetap mendasarkan diri pada dalil-dalil syar'i yang bersifat tekstual.

2. Untuk Pemerintah

Perlu ada perhatian yang lebih dan "pembinaan" khusus pada organisasi ini untuk menunjukkan bukti kepada rakyat, bahwa perbedaan sikap dan pendirian itu sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam negara demokrasi, sekalipun sistem demokrasinya itu sendiri tidak pernah mau diakui keberadaannya oleh HTI.

Secara empirik HTI ini tidak pernah ada keterlibatan secara langsung maupun tak langsung dalam gerakan-gerakan

yang sifatnya destruktif, makar atau anarkis dalam negara ini, karena itu pemerintah tidak perlu mencurigai gerakan ini sekalipun gerakan ini bersifat internasional. Apalagi jika gerakan itu hanya bergerak dalam tataran sikap dan pemikiran yang tidak anarkis dan tidak membuat resah lingkungan.

Perlu ada kebijakan-kebijakan yang bisa lebih mengakomodasi harapan dan keinginan mereka, karena pada hakikatnya keinginan dan harapan mereka itu adalah keinginan dan harapan sebagian ummat Islam Indonesia juga, dikarenakan mereka bergerak dari asas ke-Islaman yang menjadi anutan mayoritas penduduk Indonesia.

Satu hal yang mungkin bisa dijadikan pegangan bersama, bahwa gerakan Islam yang benar, tentu tidak akan melakukan perbuatan destruktif di muka bumi ini dimanapun ia keberadaannya. Karena itu pemerintah Indonesia tentulah tidak perlu terjangkiti *Islamophobia* seperti halnya orang-orang Barat terhadap Islam.

3. Untuk Program Studi Pendidikan IPS SPs UPI

Untuk prodi IPS SPs UPI, tampaknya perlu dipertimbangkan agar teori-teori politik Islam yang selama ini “termarginalkan” untuk bisa dimasukkan menjadi bagian dari teori-teori politik secara umum. Karena selama ini di prodi IPS, pemikiran-

pemikiran politiknya masih lebih banyak didominasi oleh teori-teori politik Barat.

Sebagai lembaga pengembang ilmu, prodi PIPS bisa memelopori untuk mengkaji dan menguji teori-teori politik Islam yang ada, termasuk di dalamnya yang dianut HTI baik secara empirik, ilmiah maupun filosofis, terutama dari aspek-aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologisnya. Sehingga jika teori-teori politik Islam itu bisa diterima secara akademik-ilmiah, nantinya, bukan hanya akan memperkokoh keberadaan teori politik Islam saja, melainkan juga akan memperluas cakrawala dan khasanah perkembangan ilmu politik di Indonesia, khususnya di prodi PIPS, dan pada gilirannya ia akan berimbas pada penguatan sumber-sumber belajar IPS, terutama pada nilai-nilai intraseptifnya.

Prodi PIPS pun tidak perlu “khawatir” atau “takut” dengan “faham/ajaran” HTI yang anti demokrasi dan anti sistem pemilu, karena faham/ajaran HTI hanyalah sebagian kecil dari ajaran Islam tentang negara dan pemerintahan diantara sekian banyak faham yang masih mengandung masalah *khilafiah* (perbedaan pendapat).

Selain itu, yang harus dikaji di tingkat pendidikan tinggi seperti prodi PIPS ini tentulah masalah materi keilmuannya, bukan menyebarkan fahamnya. Sama halnya ketika kita mengkaji faham filsafat dialektik materialistik yang menjadi

landasan bagi ideologi sosialis-komunis di ruang-ruang kelas, atau ketika kita mengkaji ideologi liberal yang melahirkan perilaku ekonomi kapitalistik, yang dikaji tentunya faham filsafat dan ideologinya, dan tidak ada tendensi sedikitpun untuk menyebarkan faham tersebut kepada para mahasiswa. Hal yang sama sebenarnya bisa diberlakukan untuk teori-teori politik Islam.